

**PENYAKIT-PENYAKIT TERNAK DI SULAWESI SELATAN
YANG TINGKAT PREVALENSINYA TINGGI DAN
STRATEGI PREVENTIF DAN KURATIPNYA.**

Puguh Darmadi

(BPPH Wilayah VII Ujung Pandang)

Pendahuluan

Untuk mendapatkan informasi keberadaan penyakit hewan di Sulawesi Selatan maka peran institusi Balai Penyidikan Penyakit Hewan Wilayah VII Ujung Pandang tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut disebabkan karena BPPH merupakan unit pelaksana teknis, laboratorium diagnostik yang mempunyai mandat regional meneguhkan diagnosa terhadap penyakit hewan yang dicurigai didaerah tersebut.

Timbulnya penyakit hewan yang menyerang ternak besar, kecil dan unggas selama ini masih dapat diketahui dan diawasi keberadaannya. Sehingga daftar penyakit hewan beserta penyebabnya dapat diketahui sekaligus dengan lokasi penyebarannya.

Kewaspadaan terhadap penyakit hewan yang timbul, dituntut secara maksimal. Munculnya dan keberadaan penyakit dapat diketahui sehingga upaya pengendalian dapat dilakukan secara dini dengan cara menekan kasus.

Keterpaduan gerak operasional instansi terkait untuk menghadapi letupan penyakit hewan ini telah terlihat, tetapi masih dibutuhkan peningkatan koordinasi dan tanggung jawab bersama dalam menanganinya. Keadaan tersebut dapat sewaktu-waktu terjadi, bahkan apabila munculnya penyakit hewan menular yang baru dilapangan, perlu dibutuhkan informasi dan penanganan teknis secara cepat dan metoda yang benar.

Dengan keberadaan BPPH Wilayah VII Ujung Pandang, diharapkan UPT ini dapat berperan dan bermanfaat menunjang program kesehatan hewan yang dilakukan Dinas Peternakan Tingkat I/II, meskipun mandat yang dilakukan secara regional.

Realisasi penyidikan, diagnosa dan surveillence

Selama kurun waktu tiga tahun terakhir Pelita V telah banyak kegiatan penyidikan, diagnosa dan surveillence yang telah dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat dengan diketahuinya keberadaan penyakit hewan beserta lokasi daerah penyebarannya di Sulawesi Selatan ini. Sehingga dengan hasil peneguhan diagnosa penyakit hewan tersebut dapat merupakan bahan atau data secara teknis, untuk tindakan pengendalian oleh Dinas Peternakan dilapangan.

Sebagai bahan informasi mandat fungsi BPPH, untuk lebih diketahui oleh masyarakat adalah :

1. Fungsi diagnostik
2. Fungsi penyidikan
3. Fungsi surveillence
4. Fungsi pelayanan aktif dan saran penanggulangan penyakit
5. Fungsi pemeriksaan kesehatan hewan.
6. Fungsi pembuatan peta penyakit.

7. Fungsi Kesehatan masyarakat veteriner.
8. Fungsi pengujian efektifitas vaksin (BPMSOH).
9. Fungsi pembinaan laboratorium tipe B/C.
10. Fungsi pelatihan bagi petugas lapangan.
11. Fungsi penelitian terapan.
12. Fungsi pengamatan daya guna obat (BPMSOH).

Saran dan rekomendasi teknis selalu disampaikan oleh unit pelaksana teknis ini untuk upaya pencegahan maupun pengobatan yang akan dilakukan oleh Dinas yang berwenang terhadap ternak sakit dilapangan, sehingga penyebaran penyakit dapat dijaga dan dibatasi.

Pelayanan pemeriksaan spesimen yang dilakukan melalui tindak penyidikan maupun diagnosa adalah 2 bentuk yaitu pelayanan aktif dan pasif. Aktif, artinya melakukan pelayanan dengan mengunjungi peternak yang membutuhkan bantuan apabila ternaknya terserang penyakit sehingga sistem pelayanan ini dapat mengetahui secara langsung keadaannya dilapangan. Pasif, artinya dengan menerima spesimen di laboratorium dari pengiriman spesimen yang berada dilapangan, agar masalah yang dialami pengirim spesimen tersebut dapat diketahui dan dibantu dalam tindak pencegahan maupun pengobatannya.

Penyidikan dan diagnosa yang dilakukan, telah dapat diketahui penyakit hewan dengan bermacam penyebabnya, yang menunjukkan tingkat kejadian cukup tinggi di Sulawesi Selatan ini.

Penyebab penyakit hewan yang ditemukan di lapangan dan menunjukkan tingkat kejadiannya cukup tinggi adalah Bakteri, Virus dan Parasit. Agar memberikan gambaran yang jelas dan khusus, demikian pola

pencemaran daerahnya di Sulawesi Selatan, maka penyakit seperti :

1. Brucellosis
2. Rabies
3. Penyakit Parasiter (Fasciolosis, Ascariasis dan Tripanosomiasis)
4. Penyakit Unggas (ND, CRD)

Merupakan Penyakit Hewan yang perlu untuk mendapat perhatian. Hal tersebut dapat diketahui pada saat pelayanan kesehatan hewan di lapangan maupun hasil pemeriksaan diagnosa laboratorik yang dilakukan selama ini (Informasi Diagnosa Penyakit Hewan 1980 - 1991, BPPH Wilayah VII Maros).

Saran dan Rekomendasi untuk menanggulangi penyakit-penyakit tersebut sudah dilakukan, seperti upaya tindak vaksinasi dan pemberian obat-obatan (antibiotika, anthelmentika). Tetapi dengan kondisi keterbatasan pengadaan vaksin, obat yang dialami di lapangan, maka masih sulit untuk penanganannya. Apalagi, lokasi kasus yang terletak di daerah sulit dijangkau untuk distribusi obat maupun vaksin yang dibutuhkan.

Guna mengatasi semua itu, segala upaya perlu ditempuh untuk mengurangi kesulitan yang ada, sehingga penanganan darurat dapat dilakukan dan peternak merasa bahwa kesulitannya diperhatikan.

Peranan Institusi lainnya sebagai piranti pelayanan kesehatan hewan untuk mengantisipasi keadaan penyakit hewan di lapangan perlu digerakkan dan ditingkatkan, misalnya keberadaan laboratorium type B di tingkat Propinsi, laboratorium type C di tingkat Kabupaten atau Poskeswan yang sudah didirikan. Dengan keterlibatan dan kepeduliannya maka harapan untuk memperkecil timbulnya penyakit

atau menyebarnya penyakit dapat dikurangi, sekaligus melakukan upaya pemberantasannya.

Kekhawatiran peternak terhadap serangan penyakit hewan cukup dirasakan selama ini di lapangan, tentunya perlu diimbangi dengan pelayanan yang cukup memadai untuk mencegahnya. Apalagi dengan adanya prakiraan musim kemarau yang akan datang dan berlangsung lama tahun 1992 ini, sehingga diperlukan kewaspadaan seawal mungkin bagi peternak dan petugas di lapangan. Akibat utama yang dirasakan oleh peternak adalah penurunan produksi ternak maupun kerugian ekonomis yang disebabkan oleh timbulnya penyakit hewan di sekelilingnya.

Dengan adanya letupan penyakit hewan menular di lapangan, dilain pihak profesionalisme petugas untuk pelayanan di laboratorium dituntut untuk menuju akurasinya. Keadaan ini tidak dapat disangkal lagi, karena dengan penemuan Diagnosa yang tepat dan benar dapat dijadikan modal dalam misi pengendalian penyakit di lapangan. Fasilitas peralatan juga cukup dituntut, untuk menunjang dalam standarisasi pemeriksaan secara laboratorik yang dibutuhkan.

Agar ketrampilan pengenalan pengetahuan laboratorium, pengambilan dan pengiriman spesimen dimiliki oleh pelaksana atau petugas di lapangan bertambah, (khusus bagi tenaga medis/paramedis yang bekerja di lab. type B, C atau Poskeswan) maka mulai tahun anggaran 1991/1992 telah dilakukan kursus di BPPH Wilayah VII Maros. Penyelenggaraan kursus tidak berasal dari anggaran yang sudah disediakan saja, tetapi secara swadana telah dirintis oleh beberapa Dinas Peternakan Kabupaten, untuk menambah penge-

tahuan teknis anggotanya.

Dengan melalui kursus ini, diharapkan pengetahuan tersebut dapat lebih bermanfaat dan dipergunakan langsung di lapangan untuk mempercepat informasi dan pengenalan dini penyakit hewan. Disamping pengambilan dan pengiriman spesimen yang berkualitas maupun hal yang dianggap perlu dan segera dilakukan, untuk peneguhan Diagnosa penyakit hewan secara laboratorik.

Pengembangan sistem informasi kesehatan hewan, pengamatan dini penyakit dan pelaporan semakin giat digalakkan untuk dapat mengantisipasi, munculnya letupan penyakit sewaktu-waktu.

Fungsi surveillance juga giat dilakukan untuk lebih mendata aspek yang terkait dan mempengaruhi timbulnya wabah yang tidak kita harapkan. Dengan data yang diperoleh pada misi surveillance ini, maka pemetaan dan peramalan penyakit hewan akan lebih lengkap pendataannya. Sehingga secara langsung akan lebih waspada dan memperkuat kekebalan ternak terhadap prakiraan wabah yang muncul seperti Tripanosomiasis (Surra), Anthrax dan Rabies (Bina Kesehatan Hewan 1991/1992 dan 1992/1993).

Hambatan yang muncul.

Dalam setiap kegiatan yang sudah dilakukan tersebut, muncul hambatan yang menyertainya. Hal ini disebabkan karena sebagai resiko belum adanya pengertian akan pentingnya arti misi kegiatan tersebut misalnya koordinasi dan kepedulian terhadap masalah penyakit di Lapangan, sehingga hal ini akan mempengaruhi setiap gerak perencanaan maupun pelaksanaannya sendiri.

Diharapkan hambatan tadi akan dapat berkurang dan bahkan dapat berbalik mendukung kegiatan tersebut secara terpadu sehingga dapat mengenai sasarannya.

Rencana kerja tahun anggaran 1993/1994

Dengan bekal realisasi mandat yang sudah dilakukan, maka BPPH Wilayah VII Maros lebih meningkatkan rencana kerjanya yang akan datang. Tolak ukur kegiatan masih tetap yaitu Penyidikan, Diagnosa dan Administrasi yang menunjang operasionalnya. Semua sub tolak ukur kegiatan lebih difokuskan dan ditingkatkan, agar dapat memberikan pelayanan kepada pengguna jasa BPPH sebagai Laboratorium Diagnostik.

Mandat utama penyidikan, diagnosa dan surveillance masih merupakan target yang perlu ditingkatkan dan dimasyarakatkan.

Memperkuat jajaran staf di unit pelaksana teknis ini, juga perlu dilakukan untuk dapat menjamin hasil pemeriksaan maupun peneguhan diagnosa yang diterbitkan. Peningkatan pengetahuan dapat melalui kursus formal teknis maupun program pasca sarjana yang diselenggarakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan hasil tersebut, maka penempatan staf yang berkualitas akan dapat mengisi dan menjawab tantangan yang berkembang di lapangan.

Khusus untuk mengantisipasi munculnya penyakit hewan dengan prevalensi tinggi saat ini, maka koordinasi secara terkait dengan instansi lain perlu dibuka dan ditingkatkan. Unsur penyidikan, perkarantina dan kedinasan perlu merasa terpanggil untuk menjawab tantangan ini. Agar lebih sempurna lagi, apalagi instansi

tingkat interdepartemental juga merasa bertanggungjawab untuk penanganan pada umumnya. Berlakunya peraturan dan perundang-undangan yang adapun perlu untuk dimasyarakatkan; oleh karena faktor ini merupakan suatu landasan gerak operasional yang dapat menjamin kelangsungannya.

Prediksi Rencana Bangkajang II.

Beban tugas dalam menyongsong Pembangunan Jangka Panjang tahap ke II; semakin lama semakin berat dan membutuhkan perhatian dan kesungguhan dari segi pelaksanaannya. Keadaan ini terlihat dengan munculnya tantangan baru dari segi ilmu, teknis maupun non teknis yang mengikutinya tetapi dengan tugas, fungsi dan bekal pengetahuan dan kepercayaan diri yang dimiliki oleh personil tenaga teknis itu sendiri, diharapkan mampu menjawab dan mengatasi beban pekerjaan tersebut.

Keberadaan penyakit hewan yang sedang berjangkit perlu mendapat perhatian penuh untuk mengatasinya. Tuntutan pekerjaan tersebut tidak dimiliki oleh satu instansi saja, tetapi harus dimulai memberanikan diri dan membangkitkan tekad dan tanggung jawab subsektoral maupun departemental bahkan interdepartemental sekalipun, sehingga program keterpaduan untuk menuju keberhasilan suatu kegiatan akan menjadi suatu kenyataan pada akhirnya. Dengan keterpaduan program yang dihasilkan oleh daerah hendaknya nantinya mampu melahirkan pemikiran dan ide yang cemerlang untuk tingkat nasional sebagai kebijakan umum.

Kesimpulan dan Saran.

Dengan melihat temuan pekerjaan berupa inventarisasi penyakit hewan menular yang perlu mendapat perhatian beserta segala permasalahannya, maka dapat disimpulkan bahwa kita masih dituntut akan kewaspadaan dan kesungguhan gerak penanganannya.

Disadari bahwa keterpuaian program dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi segera perlu disempurnakan untuk kemanjuran dan berhasilnya suatu kegiatan secara nyata. Sekaligus juga mengfungsikan secara optimal instansi-instansi yang ada dalam lingkup subsektor peternakan, untuk menunjang pembangunan peternakan di Sulawesi Selatan ini.

Berdasar Pengamatan tersebut, maka perlu kami sampaikan saran :

1. Agar penanganan kesehatan hewan lebih terpadu dan terprogram, khususnya menghadapi tantangan introduksi penyakit hewan baru di Sulawesi Selatan ini, misal BVD, Gumboro.
2. Perlu terobosan dan pola strategi untuk meyakinkan terhadap pihak lain bahwa masalah penyakit hewan perlu diperhatikan dan merupakan salah satu faktor yang menghambat keberhasilan pembangunan peternakan itu sendiri.
3. Landasan undang-undang dan peraturan yang berlaku perlu dimasyarakatkan.
4. Penyediaan dana, fasilitas dan tenaga yang cukup memadai guna mendukung operasional teknis yang diperlukan di lapangan.

Penutup.

Fungsi unit pelaksana teknis, untuk menunjang program-program peternakan sudah cukup jelas. Dan diharapkan semakin dapat diwujudkan untuk peningkatan pengamanan ternak pada khususnya dan peningkatan produksi peternakan pada umumnya di Sulawesi Selatan ini.

Daftar Pustaka.

1. Informasi Diagnosa Penyakit Hewan tahun 1980 s/d 1991 Balai Penyidikan Penyakit Hewan, Wilayah VII Maros.
2. Peta Penyakit Hewan Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya tahun 1989 Balai Penyidikan Penyakit Hewan, Wilayah VII Maros.
3. Peta Penyakit Hewan Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya tahun 1990. Balai Penyidikan Penyakit Hewan, Wilayah VII Maros.
4. Pedoman Umum, Pembinaan Kesehatan Hewan. Direktorat Bina Kesehatan Hewan, Ditjen Peternakan. Departemen Pertanian, Jakarta 1992